

23/12/12

## PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KELURAHAN BANDARHARJO KOTA SEMARANG

Anindita Putri Natasha<sup>1</sup>, R. Slamet Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang, Kota Semarang,

Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRAK

Stunting adalah salah satu urgensi kesehatan yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang mempengaruhi kualitas anak tersebut di masa depan. Penanganan stunting memerlukan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan melalui proses collaborative governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, serta analisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan stakeholders terkait, observasi langsung di lapangan, dan studi pustaka untuk mendalami teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kolaboratif yang aktif, proses penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang masih belum optimal. Proses kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat belum berjalan secara menyeluruh dan efektif. Faktor pendukung utama yang ditemukan adalah kebijakan pemerintah yang mendukung program penurunan stunting serta adanya komitmen politik dari pemimpin daerah. Namun, faktor penghambat yang dominan adalah rendahnya tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan, keterbatasan dana, masalah budaya yang menghambat perubahan pola makan, serta kurangnya koordinasi dan evaluasi yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan frekuensi pertemuan rutin untuk memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan dan meningkatkan koordinasi. Diperlukan juga rencana aksi yang terukur dengan evaluasi berkala, serta pendekatan berbasis budaya dan edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program seperti Gemarikan dapat dioptimalkan untuk mendorong konsumsi protein melalui edukasi dan akses bahan makanan bergizi.

**Kata Kunci:** Bandarharjo, Collaborative Governance, Partisipasi Masyarakat, Pola Asuh, Stunting.

### ABSTRACT

*Stunting is a significant public health issue that has a serious impact on children's physical growth and cognitive development, ultimately affecting the quality of human resources in the future. Addressing stunting requires collaboration among various stakeholders through a process of collaborative governance. This study aims to describe the process of collaborative governance in handling stunting in Bandarharjo Village, Semarang City, and to identify the supporting and hindering factors in the implementation of this process. The research adopts a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, direct field observations, and a literature review to examine relevant theories. The findings indicate that, although active collaborative efforts exist, the process of handling stunting in Bandarharjo Village is not yet optimal. Collaboration among the government, private sector, and the community has not been fully implemented or effective. Key supporting factors identified include government policies that support stunting reduction programs and the political commitment of local leaders. However, dominant hindering factors include low levels of trust among stakeholders, financial constraints, cultural barriers that hinder changes in dietary habits, and a lack of structured coordination and evaluation. This study recommends increasing the frequency of regular meetings to strengthen trust among stakeholders and enhance coordination. A measurable action plan with periodic evaluations is also essential, alongside culturally tailored approaches and nutritional*

education to raise public awareness. Programs like Gemarikan can be optimized to promote protein consumption through education and access to nutritious food.

**Keywords:** Bandarharjo, Collaborative Governance, Community Participation, Parenting Pattern, Stunting

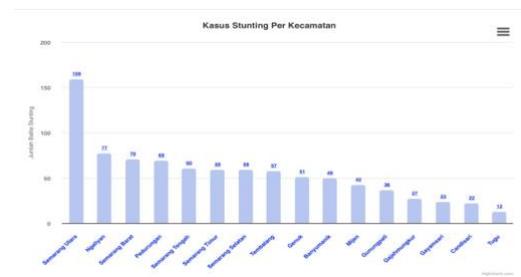
## PENDAHULUAN

Permasalahan gizi dalam masyarakat, terutama stunting, menjadi hambatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Stunting, yang merupakan kekurangan gizi kronis, berdampak serius pada pertumbuhan anak dan dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, stunting menjadi perhatian utama, dengan kontribusi terhadap kematian anak mencapai 15-17 persen. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, periode kritis yang dikenal sebagai seribu hari pertama kehidupan (Maflahah, 2019; Mauludiyah, 2020).

Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas di usia dewasa. Penyebabnya meliputi asupan gizi yang rendah dan paparan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Penilaian status gizi anak dilakukan berdasarkan indeks Panjang Badan (PB/U) atau Tinggi Badan (TB/U) dengan ambang batas Z-Score kurang dari -2,00 SD (pendek) dan kurang dari -3,00 SD (sangat pendek) (KEMENKES RI, 2016). Sejak 2012, pengentasan stunting menjadi fokus global, dengan WHO menargetkan pengurangan 40% kasus balita pendek melalui Rencana Implementasi Komprehensif yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nations, 2015).

Di Kota Semarang, Dinas Kesehatan mencatat 1.367 anak mengalami stunting pada tahun tertentu. Prevalensi stunting meningkat dari 2,57% pada 2019 menjadi 3,13% pada awal 2020, seiring

dengan pandemi COVID-19. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%, dengan Jawa Tengah di angka 20,9% dan Kota Semarang sebesar 21,3%. Puskesmas Bandarharjo mencatat prevalensi stunting tertinggi di Kecamatan Semarang Utara, dengan angka 17,38% pada 2021, meningkat dari 31 kasus pada 2019 menjadi 64 kasus pada 2020, dan 42 kasus pada Maret 2021.

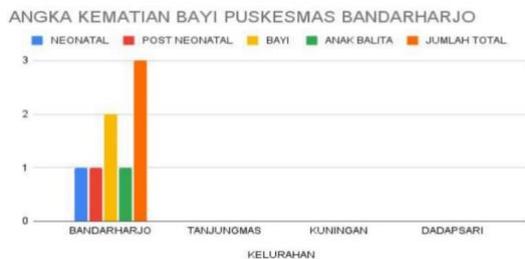


Gambar 1 Data Kasus Stunting per Kecamatan Kota Semarang  
Sumber: Dashboard Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023)

Pemerintah terus berupaya menangani stunting melalui berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Stunting juga menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di tingkat daerah, Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting.

Prevalensi stunting di Kota Semarang tercatat sebesar 1,6 persen

dari total populasi anak, dengan sebagian besar kasus terakumulasi di Kecamatan Semarang Utara, mencapai 236 kasus. Kasus-kasus tersebut tersebar di beberapa kelurahan, termasuk Tanjungmas, Bandarharjo, Kuningan, Dadapsari, Plombokan, dan Purwosari. Kelurahan Bandarharjo merupakan salah satu yang tertinggi di Kecamatan Semarang Utara dan telah beberapa kali menduduki peringkat tertinggi di Kota Semarang, termasuk pada tahun 2017, 2021, dan masih berada di peringkat tiga besar pada tahun 2023.



Gambar 2 Angka Kematian Bayi Puskesmas Bandarharjo

Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Bandarharjo (2023)

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Puskesmas Bandarharjo tahun 2024, angka kematian bayi menunjukkan tantangan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kematian post neonatal (28 hari hingga 1 tahun) tercatat sebanyak 1 anak, sering dipengaruhi oleh infeksi, malnutrisi, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kematian bayi baru lahir (dalam 28 hari pertama kehidupan) mencapai 2 anak, biasanya disebabkan oleh komplikasi persalinan, kelainan bawaan, atau kondisi kesehatan ibu yang tidak terkelola. Selain itu, tercatat 1 kematian pada kelompok anak balita (1 hingga 5 tahun) dan 1 kematian neonatal, yang dapat disebabkan oleh penyakit infeksi, malnutrisi, dan kurangnya akses perawatan kesehatan.



Gambar 3 Grafik Stunting per Kecamatan  
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023)

Kasus stunting di Kelurahan Bandarharjo menunjukkan angka yang mengkhawatirkan antara Mei hingga Agustus 2024. Pada bulan Mei, tercatat 41 anak mengalami stunting, meningkat menjadi 50 anak pada bulan Juni. Meskipun ada penurunan menjadi 45 anak pada Juli, angka tersebut kembali meningkat menjadi 47 anak pada Agustus, mencerminkan tantangan serius dalam penanganan masalah gizi di wilayah tersebut.

Berdasarkan pra-survey peneliti pada 4 September 2024, terdapat beberapa permasalahan dalam kolaborasi penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Program pelaksanaan stunting belum optimal, dengan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang hanya didistribusikan tanpa pemantauan, Dapur Sehat yang vakum, dan keterbatasan dana serta SDM untuk pendampingan oleh kader. Koordinasi antar kader Posyandu juga kurang maksimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, terdapat ketidakakuratan data posyandu dan kurangnya infrastruktur untuk pengentasan stunting.

PMT saat ini hanya berupa kudapan, padahal seharusnya menggunakan bahan lokal untuk keberlanjutan program (Bagian Gizi Dinas Kesehatan Propinsi

Jawa Timur, 2008 dalam Ningrum, 2015:63). Stunting di Bandarharjo dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi, kurangnya akses gizi, rendahnya pendidikan, dan sanitasi yang buruk. Stunting berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Upaya penanganan harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan akses gizi berkualitas, pendidikan pola makan sehat, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan sanitasi. Menurut WHO (2021), "Kolaborasi multisektoral adalah kunci untuk mengatasi masalah gizi, termasuk stunting." Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan angka stunting di Bandarharjo dapat ditekan dan kesehatan anak-anak meningkat.

Masalah kemiskinan, ketidaksetaraan akses terhadap gizi yang baik, dan layanan kesehatan yang terbatas masih memengaruhi kasus stunting. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada pemecahan masalah struktural agar

penurunan kasus stunting dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Menurut keterangan kader posyandu pada pra-survey 4 September 2024, pertemuan dengan kader, PKK, dan pemerintah setempat hanya dilakukan maksimal 1 tahun 4 kali dan tidak rutin. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak stunting karena kurangnya pengetahuan dan menganggap sepele masalah ini.

Keterbatasan dana, dengan hanya Rp 70.000,00 untuk operasionalisasi, membuat beberapa kader enggan mengikuti pertemuan, sehingga informasi tentang penanganan stunting tidak tersampaikan dengan baik. Faizah dkk. (2024) menyatakan, "Pemberian dana intensif untuk kader posyandu sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan motivasi mereka." Dukungan dana yang memadai diharapkan dapat mendorong

kader posyandu lebih aktif dalam sosialisasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kesehatan di Kelurahan Bandarharjo masih rendah, disebabkan oleh kondisi perekonomian yang lemah dan minimnya dukungan gizi dari lembaga kesehatan. Masyarakat merasa anak mereka tetap sehat meskipun tidak mengikuti anjuran kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antar kader mengenai penanganan stunting, dengan beberapa kader beranggapan bahwa anak yang tadinya stunting akan "besar sendiri" saat sudah balita.

Tabel 1 Data Pertemuan Kader dan PKK Kelurahan Bandarharjo

NO	Bulan	Pertemuan Kader	RW
1	Mei	Penimbangan Bayi dan Balita	3
2	Juni	Pertemuan Kader Kecamatan	6
3	Juli	-	
4	Agustus	Lomba PKK	8
5	September	Rapat Koor	4

Sumber: Diolah, Data Kader Posyandu Bandarharjo (2024)

Berdasarkan Handayani et al. (2023) dan Maldini et al. (2013), ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting balita, dengan dampak sebesar 0,043%. Penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga dengan ekonomi rendah memiliki risiko stunting 4,13 kali lebih besar dibandingkan anak dari keluarga dengan status ekonomi tinggi. Banyak anjuran dari lembaga kesehatan mengenai pemenuhan gizi anak terabaikan, dan ketidakkonsistenan

pemerintah dalam penurunan angka stunting terlihat dari kurangnya pemantauan pemberian makanan bergizi. Kader posyandu melaporkan bahwa asupan gizi untuk balita tidak selalu diberikan setiap bulan, tergantung pada ketersediaan dari posyandu.

Sebagian besar masyarakat, yang terdiri dari 596 orang (63,3%) petani dengan penghasilan rendah (BPS, 2023), mengandalkan asupan gizi dari pemerintah. Namun, masyarakat masih acuh terhadap himbuan tenaga kesehatan, dan pemerintah tidak konsisten dalam perannya. Kader posyandu juga tidak mendapatkan upah, yang mengurangi motivasi mereka.

Dalam konteks penanganan stunting di Kelurahan Bandharharjo, penting untuk menerapkan proses collaborative governance yang efektif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat (Siskasari et al., 2020). Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kasus stunting di wilayah ini dapat membantu mengidentifikasi strategi kolaboratif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat tentang gizi. Penelitian sebelumnya, seperti oleh Herlianti (2020), Lailia dkk. (2021), dan Rosalia et al. (2022), menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam keberhasilan program pengurangan stunting. Purbani dkk. (2019) juga menegaskan bahwa dukungan dan komitmen antar stakeholders diperlukan untuk mencapai tujuan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa proses collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandharharjo belum optimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI**

## **KELURAHAN BANDARHARJO KOTA SEMARANG.”**

### **KAJIAN TEORI**

#### **Administrasi Publik**

Pasolong (2014) menyatakan bahwa administrasi merupakan usaha bersama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Syafiie (2010) mengartikan publik sebagai individu dengan kesamaan pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang sejalan dengan nilai dan norma yang dianut. Administrasi publik, menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Syafiie, 2010), melibatkan kerjasama antara berbagai kelompok dalam pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dalam merancang kebijakan publik dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai kolaborasi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam ranah pemerintahan, mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan penyediaan layanan publik. Kerjasama antar lembaga pemerintahan dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas layanan. Administrasi publik juga melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan aktor di tingkat lokal, nasional, dan internasional, termasuk pengelolaan sumber daya publik dan penegakan hukum (Almahdali et al., 2024).

#### **Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Keban (2008) yang merujuk pada teori Nicholas Henry, konsep Administrasi Negara dapat dibagi menjadi enam perspektif utama:

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik Administrasi, 1900-1926): Frank J. Goodnow dan Leonard D. White membedakan antara politik, yang berfokus pada pengambilan kebijakan, dan administrasi, yang berkonsentrasi pada implementasi kebijakan. Namun, paradigma ini hanya menekankan birokrasi

- pemerintahan tanpa membahas metode administrasi publik secara rinci.
2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937): Tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick, terpengaruh oleh pemikir manajemen klasik, memperkenalkan prinsip administrasi POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting). Mereka beranggapan prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat diterapkan di sektor pemerintah maupun swasta.
  3. Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970): Terdapat ketegangan antara administrasi negara dan ilmu politik, dengan pandangan baru yang menganggap administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Fokusnya menjadi kabur karena kelemahan prinsip-prinsip administrasi publik.
  4. Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970): Paradigma ini mengembangkan pemahaman tentang teori organisasi dan manajemen, dengan fokus pada perilaku organisasi dan penerapan teknologi modern. Namun, lokusnya menjadi kabur karena asumsi bahwa konsep-konsep ini berlaku di bisnis dan administrasi publik.
  5. Paradigma 5 (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970-sekarang): Pendekatan ini memperjelas ruang lingkup kajian administrasi, mencakup dinamika organisasi, prinsip pengelolaan, dan analisis kebijakan bermasyarakat, dengan fokus pada persoalan dan kebutuhan publik.
  6. Paradigma 6: Governance: Taufiqurokhman (2018) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan memiliki dua peran

fundamental: perumusan arah dan strategi nasional serta pelaksanaan kebijakan. Pemisahan kekuasaan Montesquieu memisahkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana legislatif dan yudikatif menetapkan tujuan negara, sementara eksekutif melaksanakan kebijakan secara apolitis.

### **Manajemen Publik**

Menurut Overman (1984), manajemen publik adalah bidang studi interdisipliner yang menggabungkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam konteks organisasi pemerintahan. Sebagai cabang dari ilmu administrasi publik, manajemen publik mencakup perancangan program, perubahan struktur organisasi, perumusan kebijakan, perencanaan manajerial, alokasi sumber daya, pengelolaan anggaran dan keuangan, serta sumber daya manusia, termasuk audit dan evaluasi. Manajemen publik juga melibatkan pengelolaan lingkungan eksternal organisasi, sementara administrasi publik lebih fokus pada operasi internal (Overman, 2010).

Ada empat prinsip fundamental dalam manajemen publik yang mempertimbangkan aspek politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perubahan dalam pemerintahan. Agronof dan McGuire (dalam Kapucu, 2010) mendefinisikan manajemen publik kolaboratif sebagai proses yang memfasilitasi kerjasama antar-organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu organisasi. Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008) menekankan bahwa manajemen adalah usaha untuk mengelola organisasi dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Minogue (2000) mengidentifikasi lima karakteristik utama manajemen publik:

1. Fokus pada tugas operasional pemerintahan, bukan perumusan kebijakan.

2. Menekankan pencapaian tujuan daripada proses dan prosedur.
3. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
4. Memberikan arahan atau pemberdayaan kepada masyarakat, bukan pelayanan langsung.
5. Mengadopsi budaya yang berbeda dari budaya birokrasi tradisional.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa manajemen publik memiliki cakupan luas dalam mengelola organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Collaborative Governance***

*Governance*, menurut Kooiman (2009:273), adalah konsep yang menggambarkan interaksi dalam proses pemerintahan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Keban (2008:38) menjelaskan bahwa *governance* mencakup sistem nilai, kebijakan, dan lembaga yang mengatur bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai penerapan kekuasaan dalam politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola isu-isu negara (Sedarmayanti, 2003:5).

*Collaborative governance* adalah sistem tata kelola di mana pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dengan prinsip kesetaraan dan demokrasi. Dalam kerjasama ini, setiap pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri namun tetap berkomitmen pada kesepakatan bersama. Konsep ini bertujuan untuk menyatukan berbagai pihak dalam platform bersama untuk mengatasi permasalahan tata kelola yang tidak terselesaikan.

Proses *collaborative governance*

melibatkan tiga aktor utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Model Ansell dan Gash memberikan kerangka untuk tata kelola kolaboratif, di mana pemilihan pemimpin yang tepat sangat penting untuk menjaga struktur horizontal dan mendorong hubungan yang baik. Proses kolaborasi dimulai dengan interaksi langsung untuk membangun kepercayaan, yang meningkatkan komitmen dan pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan.

Tahapan dalam kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008) meliputi:

1. *Face to face dialogue*: Dialog langsung untuk mengidentifikasi peluang dan manfaat bagi semua pihak.
2. *Trust building*: Membangun kepercayaan di antara stakeholder dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing.
3. *Commitment to process*: Komitmen dari semua pihak untuk mendukung proses kolaboratif dan memantau efektivitasnya.
4. *Shared Understanding*: Memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan yang ingin dicapai.
5. *Intermediate outcomes*: Mencapai hasil sementara yang mencakup pencapaian tujuan dan manfaat dari kolaborasi, yang penting untuk keberhasilan jangka panjang.

### **Faktor-faktor Penghambat Collaborative Governance**

Menurut *Government of Canada Collaborative Governance* (2008), terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses *collaborative governance*:

1. Faktor Budaya  
Budaya yang terlalu bergantung pada prosedur birokratis dan

keengganan menghadapi ketidakpastian dapat menghambat kolaborasi. Ketergantungan pada prosedur yang ada dan ketidaknyamanan dengan risiko membatasi kemampuan pelayan publik dan pemimpin untuk beradaptasi dan berinovasi. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki sikap pragmatis dan berorientasi pada hasil dalam kemitraan.

## 2. Faktor Institusi

Kolaborasi sering kali terhambat oleh struktur hierarkis yang diterapkan oleh institusi pemerintah. Kolaborasi yang efektif memerlukan dialog terbuka dan berbagi keahlian antara berbagai pihak, serta pendekatan yang lebih horizontal. Transparansi dan akuntabilitas antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi, sehingga institusi publik perlu memperbaiki praktik akuntabilitas mereka agar sesuai dengan dinamika kerja sama lintas sektor.

## 3. Faktor Politik

Faktor politik berperan signifikan dalam collaborative governance. Kegagalan kolaborasi sering disebabkan oleh kurangnya inovasi dari pemimpin dalam menghadapi tujuan politik yang kompleks, yang dapat memicu konflik. Meskipun kolaborasi dapat mengurangi konflik tujuan, perubahan kesepakatan dan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dapat menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk terus berinovasi, berkomunikasi dengan baik, dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi kolaborasi.

### ***Stunting***

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh

pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), di mana tinggi dan berat badan anak lebih rendah dibandingkan teman seusianya, disebabkan oleh kekurangan gizi atau malnutrisi (Candra, 2020). Stunting dapat mengganggu perkembangan otak, sensor motorik, serta pertumbuhan dan perkembangan mental anak (Rahayu et al., 2018).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa pengukuran berat dan tinggi badan anak secara rutin penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan, serta mencegah stunting. Strategi Nasional untuk Percepatan Penurunan Stunting, yang diresmikan pada 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, bertujuan menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024. Rencana ini mencakup lima pilar percepatan penurunan stunting dan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, yang memerlukan proses *Collaborative Governance* untuk mendukung upaya tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merumuskan strategi penanggulangan stunting melalui dua pendekatan intervensi. Intervensi gizi spesifik berfokus pada penanganan faktor penyebab langsung stunting, termasuk perbaikan konsumsi nutrisi dan pengendalian penyakit menular. Di tingkat provinsi, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 juga bertujuan mempercepat penurunan stunting, mendefinisikan stunting sebagai kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, dengan target prevalensi di bawah 20% melalui delapan aksi konvergensi pencegahan stunting.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan

pendekatan ilmiah yang bertujuan mengeksplorasi peristiwa melalui ragam metode yang telah ada. Pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada pengumpulan data dalam bentuk naratif, visual, dan non-numerik yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi visual, rekaman, serta sumber informasi lainnya (Moleong, 2010). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami proses collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pihak pemerintah, kader posyandu, dan masyarakat, serta observasi langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk mendalami teori-teori relevan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menjaga validitas data yang dikumpulkan. Subjek penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan isu collaborative governance dan pengentasan stunting di wilayah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo.**

#### **Face to Face Dialogue**

Dialog tatap muka adalah upaya komunikasi penting dalam mencapai kesamaan maksud dan tujuan antara berbagai pihak dalam proses collaborative governance (Ansell & Gash, 2008). Di Kelurahan Bandarharjo, pertemuan formal mengenai penanganan stunting dilakukan 2-4 kali setahun, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penanggung jawab TPPS Kelurahan

Bandarharjo menyatakan bahwa meskipun pertemuan belum terlalu intens, respon terhadap pembahasan stunting cukup baik, meski ada kendala seperti ketidakhadiran dan keterlambatan laporan (Wawancara, 20 Oktober 2024).

Kader Posyandu juga menegaskan bahwa pertemuan melibatkan berbagai aktor dan meskipun ada tantangan, diskusi tetap berjalan lancar. Mereka berusaha mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama (Wawancara, 17 Oktober 2024). Programmer stunting Puskesmas Bandarharjo menambahkan bahwa meskipun pertemuan tidak dilakukan setiap bulan, kolaborasi tetap berjalan meski ada tantangan (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Observasi menunjukkan bahwa pertemuan rembuk stunting menjadi fasilitas untuk berbagi laporan dan evaluasi progres penanganan stunting. Namun, beberapa pihak terlambat hadir dan kurangnya timbal balik dari aktor lain menjadi kendala. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menunjukkan langkah positif dalam kolaborasi ini.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 mengatur percepatan pencegahan stunting, dengan menekankan inklusivitas dalam rembuk stunting, di mana semua aktor diberi kesempatan untuk berkontribusi (Pemprov Jawa Tengah, 2019). Meskipun prinsip inklusivitas diterapkan, ketidakhadiran peserta dan keterlambatan laporan menghambat efektivitas program.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo melibatkan kolaborasi intens antar kader dan pihak terkait. Diskusi mencakup pengaturan jadwal program dan cara mencapai hasil yang baik, dengan keterlibatan sektor swasta dalam memberikan masukan dan

dukungan. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi stunting, sesuai dengan prinsip-prinsip *collaborative governance* yang menekankan dialog terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak (Ansell & Gash, 2008). Meskipun ada kendala, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.

### ***Trust Building***

*Trust building* dalam proses *collaborative governance* merujuk pada upaya menciptakan kepercayaan antar aktor dan memenuhi tanggung jawab masing-masing stakeholder, serta mendengarkan aspirasi masyarakat untuk memperkuat hubungan dalam pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008). Di Kelurahan Bandarharjo, Lurah Bandarharjo menekankan pentingnya komunikasi dan komitmen dalam setiap pertemuan untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat (Wawancara, 24 Oktober 2024).

Namun, Sekretaris Kelurahan Bandarharjo menyoroti tantangan dalam kolaborasi, seperti kesulitan dalam mengatur pertemuan dan keterlambatan laporan dari beberapa aktor (Wawancara, 17 Oktober 2024). Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang juga mengakui bahwa kolaborasi sering terhambat oleh komunikasi yang sulit dan keterbatasan waktu (Wawancara, 20 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara, penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan pihak swasta memberikan bantuan makanan tambahan (PMT) dan program Rumah Sigap. Meskipun ada alur yang jelas untuk distribusi bantuan, keterlambatan dalam penyaluran mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Kader Posyandu berperan dalam mendistribusikan bantuan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam pelaporan

dan keterlambatan (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Observasi menunjukkan bahwa tidak ada saluran formal untuk menampung aspirasi masyarakat secara sistematis, sehingga masyarakat lebih mengandalkan komunikasi informal. Hal ini mencerminkan kurangnya mekanisme untuk menanggapi masukan masyarakat secara langsung. Agbodzakey (2024) menekankan bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat harus disertai tindak lanjut yang jelas. Masyarakat merasa kesulitan untuk mengungkapkan pendapat secara langsung, dan setelah memberikan masukan, mereka tidak tahu apakah ada tindak lanjut.

Secara keseluruhan, pemenuhan tanggung jawab antar *stakeholders* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi, pelaporan, dan penampungan aspirasi masyarakat. Meskipun ada upaya untuk membangun *Commitment to process* kolaborasi, tantangan seperti keterbatasan waktu, biaya, dan keterlambatan laporan masih menghambat efektivitas program. Diperlukan mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan ditindaklanjuti.

### ***Commitment to Process***

dalam *collaborative governance* merujuk pada kesediaan semua pihak untuk mengikuti prosedur dan struktur yang telah ditetapkan, serta melanjutkan program penanganan stunting, termasuk pengawasan dan evaluasi (Ansell & Gash, 2008). Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang menekankan pentingnya komitmen dalam menyelenggarakan Rembuk Stunting dan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kelurahan Bandarharjo (Wawancara, 18 Oktober 2024). Lurah Bandarharjo juga menegaskan bahwa semua pihak harus berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting, meskipun ada kekhawatiran terkait keberlanjutan program akibat perubahan regulasi dan ketergantungan

pada pihak swasta (Wawancara, 16 Oktober 2024).

Pihak swasta, melalui CSR, mengungkapkan kekhawatiran tentang keberlanjutan program karena bantuan CSR biasanya memiliki masa berlaku terbatas (Wawancara, 29 Oktober 2024). Kader Posyandu menyoroti tantangan dalam mempertahankan minat generasi muda untuk terlibat sebagai kader, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara, meskipun ada komitmen yang terbentuk, tantangan dalam keberlanjutan program penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo masih ada, terutama terkait dengan ketidakpastian pendanaan dan kurangnya minat masyarakat untuk berperan aktif. Sekretaris Kelurahan Bandarharjo menjelaskan bahwa evaluasi dan monitoring dilakukan melalui Rembuk Stunting, tetapi ada kendala seperti pergantian personel yang tidak sesuai bidang dan kurangnya kompetensi peserta (Wawancara, 30 Oktober 2024). Programmer Puskesmas Bandarharjo menambahkan bahwa meskipun mereka berusaha untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, pengawasan masih terbatas (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Observasi menunjukkan bahwa tidak ada sistem evaluasi yang terstruktur, dan laporan yang ada lebih bersifat rutin tanpa analisis mendalam. Gambar 3.3 menunjukkan kegiatan monitoring yang dilakukan, tetapi tidak semua RW dimonitor secara rutin.

Secara keseluruhan, komitmen untuk melanjutkan program penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan dalam sistem evaluasi dan monitoring, serta ketidakpastian dalam keberlanjutan program, menunjukkan bahwa kolaborasi yang diharapkan belum berjalan dengan baik. Diperlukan perbaikan dalam koordinasi, penguatan kapasitas, dan sistem pelaporan agar penanganan stunting dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

### ***Shared Understanding***

*Shared understanding* dalam *collaborative governance* mengacu pada kesepakatan dan pemahaman bersama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai (Ansell & Gash, 2008). Di Kelurahan Bandarharjo, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai penanganan stunting melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang menekankan pentingnya persepsi yang sama di antara semua stakeholder untuk menghindari ego sektoral dan memastikan program berjalan lancar (Wawancara, 30 Oktober 2024).

Lurah Bandarharjo menambahkan bahwa semua pihak harus berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting, dan Dinas Kesehatan berperan penting dalam melakukan pendekatan pendampingan keluarga (Wawancara, 22 Oktober 2024). Masyarakat juga terlibat dalam sosialisasi tentang pentingnya gizi dan cara menjaga kesehatan anak, yang membantu mereka memahami isu stunting (Wawancara, 24 Oktober 2024).

Programmer stunting Puskesmas Bandarharjo menyatakan bahwa pelatihan kader dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang penanganan stunting, memastikan program berjalan dengan baik (Wawancara, 30 Oktober 2024). Semua pihak berusaha untuk memahami bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama lintas sektor.

Meskipun ada upaya untuk menciptakan kesamaan pemahaman, tantangan tetap ada, seperti perlunya komunikasi yang jelas dan konsisten. Dinas Kesehatan menekankan pentingnya intervensi gizi sensitif dan

spesifik yang tidak dapat dilakukan sendiri tanpa kolaborasi (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Observasi menunjukkan bahwa pelatihan pola asuh oleh Tanoto Foundation juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan stunting. Gambar 3.4 menunjukkan kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk memperkuat visi dan misi penanganan stunting.

Penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo mencerminkan upaya kolaboratif yang baik, dengan semua pihak berusaha menyatukan visi dan tujuan untuk menurunkan angka stunting. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *collaborative governance* yang menekankan interdependensi dan tujuan bersama.

### ***Intermediate Outcomes***

*Intermediate outcomes* dalam *collaborative governance* merujuk pada hasil atau pencapaian yang terjadi selama proses kolaboratif antara berbagai pihak yang terlibat (Ansell & Gash, 2008). Di Kelurahan Bandarharjo, Sekretaris TPPS menyatakan bahwa pada 2024, beberapa CSR terlibat dalam penanganan stunting, dan diharapkan lebih banyak partisipasi dari CSR untuk mengidentifikasi risiko stunting pada keluarga dan anak (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar pihak, meskipun ada kendala dalam pelaporan dan update data (Wawancara, 25 Oktober 2024). Programmer Puskesmas Bandarharjo juga mengakui bahwa belum ada target kerja jangka pendek yang spesifik, dan fokus mereka masih pada penurunan angka stunting secara umum (Wawancara, 30 Oktober 2024). Kader Posyandu menyoroti tantangan dalam pelaporan dan kekurangan pelatihan untuk kader baru (Wawancara, 18 Oktober 2024).

Meskipun ada upaya kolaboratif, belum ada target kerja yang jelas dan terukur dalam program penanganan

stunting di Kelurahan Bandarharjo. Koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta belum cukup untuk memastikan keberlanjutan program. Dinas Kesehatan mengakui bahwa tanpa target yang jelas, sulit untuk menilai efektivitas program (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menekankan pentingnya intervensi yang terencana dan terukur untuk penurunan stunting. Namun, di Kelurahan Bandarharjo, belum ada penetapan target jangka pendek yang konkret, sehingga pelaksanaan program terkesan kurang terarah. Kader merasa kurang termotivasi tanpa target yang jelas, dan Dinas Kesehatan mengakui kesulitan dalam evaluasi tanpa patokan yang jelas.

Meskipun ada upaya kolaboratif, penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo masih menghadapi kendala dalam penetapan target kerja yang konkret dan terukur. Diperlukan pembentukan target yang lebih spesifik dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program. *Intermediate outcomes* terkait penurunan angka stunting belum memenuhi harapan karena kurangnya target kerja yang jelas.

### **Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo**

Berdasarkan *Government of Canada Collaborative Governance* (2008) terdapat beberapa faktor internal dan eksternal dalam proses *collaborative governance*, termasuk dalam konteks penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo.

#### **a. Faktor budaya**

Faktor budaya memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan menghambat proses *collaborative governance* untuk penanganan stunting. Budaya dapat mempengaruhi pola kehidupan dan interaksi sosial, yang berdampak pada partisipasi masyarakat

dalam program-program kesehatan (Amri Marzali, 2014). Di Kelurahan Bandarharjo, Lurah Bandarharjo menyatakan bahwa penting untuk menghindari ego sektoral dan memastikan semua stakeholder memiliki persepsi yang sama tentang stunting sebagai masalah bersama (Wawancara, 18 Oktober 2024).

Programmer stunting Puskesmas Bandarharjo menambahkan bahwa meskipun ada pembagian tugas yang jelas, masih ada tantangan dalam pelaksanaan program, termasuk keterlambatan dalam pelaporan dan masalah teknis (Wawancara, 27 Oktober 2024). Kader Posyandu juga mengungkapkan kesulitan dalam menghadapi masyarakat yang lebih memilih pengobatan tradisional dan pola makan yang tidak mencukupi gizi anak (Wawancara, 22 Oktober 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa budaya masyarakat setempat mempengaruhi efektivitas upaya penanganan stunting. Beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa stunting adalah takdir dan memiliki kebiasaan memberi nasi pada anak usia dua tahun, yang menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi yang baik. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pola makan anak-anak di Kelurahan Bandarharjo tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang, dengan banyak anak yang mengonsumsi makanan tidak bergizi dan tidak teratur.

Siti Nurjanah (2013) menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya yang mengakar dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam penanganan stunting. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal diperlukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam komunikasi dan edukasi kesehatan dapat membantu memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang.

Untuk mencapai penurunan angka

stunting di Kelurahan Bandarharjo, diperlukan pendekatan holistik yang sensitif terhadap budaya lokal. Penyuluhan yang efektif dan peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait dapat menciptakan perubahan perilaku positif dalam masyarakat.

#### **b. Faktor Institusi**

Faktor institusi, terutama penerapan sistem hierarkis di pemerintah, dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam penanganan stunting. Pengaturan institusional dan tata kelola yang baik sangat penting untuk kolaborasi efektif antara sektor kesehatan, pendidikan, gizi, dan perlindungan sosial (World Bank, 2018). Lurah Bandarharjo menyatakan bahwa SOP yang ada membantu memastikan bahwa semua stakeholder memahami peran mereka dan menghindari ego sektoral (Wawancara, 18 Oktober 2024).

Programmer stunting Puskesmas Bandarharjo menambahkan bahwa meskipun ada struktur hierarkis, kolaborasi tetap berjalan dengan baik, dan semua pihak harus mengikuti SOP yang berlaku (Wawancara, 14 Oktober 2024). Penanggung jawab TPPS juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi, meskipun belum ada SOP yang mengatur kolaborasi antar instansi secara spesifik (Wawancara, 20 Oktober 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP dan SK TPPS di Kelurahan Bandarharjo memberikan kejelasan tupoksi bagi masing-masing instansi, memungkinkan mereka menjalankan program sesuai peran tanpa tumpang tindih. Observasi peneliti juga mengonfirmasi bahwa SOP yang diterapkan membantu dalam penanganan stunting.

Sulaiman (2015) menekankan bahwa struktur organisasi yang jelas dan prosedur transparan adalah elemen penting dalam kolaborasi antar institusi. Keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada pengelolaan komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas sesuai SOP. Meskipun struktur hierarkis tidak

selalu diterapkan, kejelasan tupoksi dan pembagian tugas antar instansi sangat membantu mengoptimalkan kolaborasi.

Secara keseluruhan, faktor institusi, terutama adanya SOP yang jelas, merupakan pendukung penting dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Kejelasan mengenai tupoksi dan pembagian tugas antar instansi membantu meningkatkan efektivitas kolaborasi.

### **c. Faktor Politik**

Kegagalan dalam kolaborasi sering disebabkan oleh kurangnya inovasi dari pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang kompleks. Komitmen politik sangat penting untuk investasi berkelanjutan dalam gizi, dan di negara-negara di mana kepemimpinan menjadikan gizi sebagai prioritas, kemajuan dalam mengurangi stunting lebih cepat (The Lancet, 2013). Di Kelurahan Bandarharjo, penanggung jawab TPPS menyatakan bahwa kolaborasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk mengatasi stunting (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Dinas Kesehatan Kota Semarang menambahkan bahwa meskipun banyak inovasi telah dilakukan, tantangan tetap ada, seperti masyarakat yang tidak melanjutkan praktik baik dalam kehidupan sehari-hari (Wawancara, 27 Oktober 2024). Programmer stunting Tanoto Foundation juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam program CSR untuk penanganan stunting (Wawancara, 18 Oktober 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dan mitra lainnya telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk Program PMT dan sosialisasi, untuk penanganan stunting. Meskipun ada upaya kolaboratif, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan politik dan alokasi anggaran yang tepat. Gambar 3.6 menunjukkan pelaksanaan kegiatan PMT yang dilakukan pada 19 September 2024 di RW 02.

Faktor politik berperan penting dalam penanganan stunting di Kelurahan

Bandarharjo. Suharto (2018) mencatat bahwa kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penurunan angka stunting. Kebijakan politik yang mendukung pengalokasian anggaran dan inovasi lintas sektor dapat memperkuat program-program yang ada. Tanpa dukungan politik yang kuat, keberlanjutan dan perluasan program penurunan stunting akan terhambat.

Kesimpulannya, faktor politik sangat menentukan keberhasilan penanganan stunting, karena kebijakan dan keputusan politik mempengaruhi alokasi anggaran, koordinasi antar sektor, dan komitmen untuk mempercepat penurunan angka stunting. Diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan konsistensi kebijakan, menumbuhkan komitmen politik, melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dan memperkuat sistem pengawasan serta evaluasi program di Kelurahan Bandarharjo.

### **Riset Lanjutan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Bandarharjo, terdapat dua faktor penghambat lainnya. Yakni faktor ekonomi dan agama, faktor ini memiliki peran besar pada proses *collaboratie governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo

#### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Keterbatasan ekonomi sering menjadi hambatan utama dalam pemenuhan gizi yang seimbang, dan akses terhadap layanan kesehatan juga terbatas bagi keluarga berstatus ekonomi rendah. The Lancet (2013) menyatakan bahwa kemajuan dalam mengurangi stunting bergantung pada kapasitas ekonomi

masyarakat dan alokasi anggaran pemerintah untuk program gizi.

Lurah Bandarharjo mengungkapkan bahwa banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka karena harus memilih antara kebutuhan pokok dan makanan bergizi (Wawancara, 30 Oktober 2024). Masyarakat juga mengakui bahwa mereka mengandalkan bantuan pemerintah dan program PMT, tetapi masih kesulitan untuk menerapkan pola makan sehat karena masalah ekonomi (Wawancara, 27 Oktober 2024). Kader posyandu menambahkan bahwa meskipun mereka memberikan informasi tentang pentingnya gizi, banyak keluarga yang tidak dapat mengikuti program PMT secara rutin karena keterbatasan penghasilan (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan program penurunan stunting. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka, meskipun ada program pemerintah. Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa ekonomi yang tidak inklusif akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan sosial, termasuk penurunan stunting.

Meskipun kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil di Kelurahan Bandarharjo sudah berjalan, faktor ekonomi yang tidak mendukung menghambat keberhasilan jangka panjang program tersebut. Program seperti pemberian makanan tambahan dan pelatihan pola makan sehat tidak efektif jika masyarakat tidak memiliki akses ekonomi yang memadai untuk membeli makanan bergizi secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan ekonomi yang cukup di tingkat keluarga untuk mendukung upaya penurunan stunting.

Secara keseluruhan, faktor ekonomi merupakan penghambat signifikan dalam

kolaborasi pemerintah untuk penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Meskipun berbagai upaya kolaboratif telah dilakukan, keterbatasan ekonomi keluarga menjadi kendala besar dalam mengimplementasikan perubahan pola makan yang sehat. Pendekatan yang lebih inklusif secara ekonomi harus diperkenalkan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pengentasan stunting.

#### **b. Faktor Agama**

Faktor agama dapat menjadi penghambat dalam kolaborasi pemerintah untuk penanganan stunting, terutama ketika keyakinan atau praktik agama bertentangan dengan prinsip gizi sehat. Di Kelurahan Bandarharjo, beberapa warga memiliki keyakinan yang mempengaruhi pola makan mereka, yang dapat menghambat keberhasilan program penurunan stunting. Hakim (2021) menyatakan bahwa hambatan dalam program kesehatan sering muncul ketika keyakinan agama bertentangan dengan kebutuhan gizi yang direkomendasikan.

Lurah Bandarharjo menjelaskan bahwa beberapa keluarga tidak mengonsumsi daging hewan, yang mempengaruhi kecukupan gizi anak-anak (Wawancara, 16 Oktober 2024). Kader Posyandu menambahkan bahwa masyarakat yang menganut agama Hindu, misalnya, tidak mengonsumsi daging sapi dan kesulitan menerima alternatif sumber protein seperti telur (Wawancara, 20 Oktober 2024). Masyarakat juga mengakui bahwa mereka memilih makanan lain, tetapi merasa kesulitan memenuhi saran gizi yang diberikan (Wawancara, 29 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara, faktor agama menjadi penghambat penting dalam penanganan stunting. Keyakinan yang melarang konsumsi daging hewan mengurangi akses terhadap sumber protein yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Meskipun ada upaya edukasi dan alternatif sumber gizi, keteguhan keyakinan agama dapat menghalangi implementasi pola makan sehat.

Fakhriyah & Suwardi (2021) menyatakan bahwa pengaruh agama terhadap pola makan dapat berdampak pada keluarga secara keseluruhan, terutama dalam keberhasilan program kesehatan yang berfokus pada gizi. Oleh karena itu, penting bagi program kolaboratif untuk menghormati keyakinan agama masyarakat dan mencari solusi alternatif yang sesuai.

Secara keseluruhan, faktor budaya dan institusi masih menjadi hambatan utama dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru tentang pola makan yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Faktor institusi menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi dan kejelasan tugas melalui SOP penting dalam penanganan stunting. Faktor politik juga berpengaruh, di mana komitmen politik dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memprioritaskan stunting dalam kebijakan dan alokasi anggaran. Meskipun faktor politik di Kelurahan Bandarharjo sudah cukup baik, tantangan tetap ada dalam mengatasi faktor budaya dan agama yang mempengaruhi pola makan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Proses Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo telah berjalan aktif, namun belum maksimal. Rincian prosesnya meliputi:
  - a. Dialog Tatap Muka dan Pemahaman Bersama: Pertemuan formal dan non-formal dilaksanakan 2-4 kali setahun, yang masih dianggap kurang. Meskipun telah dibentuk TPPS untuk mengkoordinir, dialog tatap muka yang minim menghambat kolaborasi.
  - b. Pembangunan Kepercayaan: Penanganan stunting belum maksimal karena beberapa stakeholders belum menjalankan tupoksi secara optimal dan kurangnya upaya mendengarkan

aspirasi masyarakat. Komitmen terhadap proses juga tidak maksimal, dengan ketergantungan pada aktor lain dan regulasi yang tidak stabil. Evaluasi dan monitoring belum terjadwal, dan laporan yang ada tidak mencakup evaluasi program. Belum ada cita-cita jangka pendek atau target kerja yang terstruktur jelas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo. Adapun rinciannya sebagai berikut:

#### a. Faktor Pendukung

- Institusi: Insentif dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah mendukung kolaborasi berkelanjutan.
- Politik: Komitmen dan dukungan politik pemimpin daerah memaksimalkan prioritas dan alokasi sumber daya untuk program penurunan stunting.

#### b. Faktor Penghambat

- Budaya: Kepercayaan dan tradisi yang menghambat perubahan dalam pola asuh dan pola makan.
- Ekonomi: Keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan gizi.
- Agama: Ajaran agama yang melarang konsumsi daging hewani mengurangi akses terhadap sumber protein.

3. Pentingnya Dialog Tatap Muka dalam Membangun Kepercayaan dan Komitmen Stakeholders dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Bandarharjo.

Dialog tatap muka yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan (trust building) di antara stakeholders. Jika trust building lemah, komitmen untuk berkolaborasi dalam penanganan stunting juga akan

berkurang, yang menghambat keterlibatan aktif dan pencapaian intermediate outcomes yang diharapkan. Oleh karena itu, meningkatkan interaksi langsung dan membangun kepercayaan di antara semua stakeholders sangat penting agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diteliti, terdapat beberapa upaya yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam mengatasi masalah proses collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo:

1. Saran yang diberikan pada proses *Collaborative Governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo, yaitu:
  - a. Mengingat dialog tatap muka yang hanya dilakukan 2-4 kali setahun belum cukup untuk membangun hubungan yang kuat antara stakeholders, perlu meningkatkan frekuensi dan intensitas pertemuan. Pertemuan rutin akan memperkuat trust building, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan, dan mendorong keterlibatan aktif. Jika dialog tatap muka tidak efektif, hasil kolaborasi akan kurang optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan pertemuan di mana semua pihak dapat berbagi informasi, mendiskusikan tantangan, dan merumuskan solusi bersama.
  - b. Diperlukan mekanisme transparan untuk memastikan setiap pihak memenuhi kewajibannya. Pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak untuk berbagi informasi dan update program sangat penting. Selain itu, perlu dibuat pos pelayanan informasi yang mudah diakses oleh warga, baik melalui aplikasi maupun pertemuan langsung dengan fasilitator untuk mengakomodasi keluhan dan ide masyarakat.
  - c. Penting untuk memiliki rencana aksi yang jelas dan terjadwal untuk menciptakan komitmen jangka panjang dari seluruh stakeholder. Evaluasi berkala atas hambatan yang dihadapi perlu dilakukan dengan membentuk tim pengawas independen untuk memastikan jalannya program dan mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan.
  - d. Cita-cita jangka pendek harus memiliki sasaran yang terukur, seperti perbaikan akses gizi dan penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak. Sasaran ini harus realistis, misalnya mengurangi prevalensi stunting sebesar X% dalam waktu satu tahun atau enam bulan. Dengan pendekatan ini, diharapkan intermediate outcomes dalam program penanganan stunting dapat tercapai dengan lebih baik dan berkelanjutan.
2. Rekomendasi yang dapat diberikan pada faktor penghambat pada proses *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo adalah sebagai berikut:
  - a. Terkait Faktor Budaya yang ada, libatkan tokoh adat atau budaya untuk memberikan edukasi berbasis nilai-nilai lokal, adaptasi pola makan tradidijhsional yang bergizi dan sesuai dengan kebiasaan lokal, serta sesuaikan dengan pola makan sehat yang mudah diakses masyarakat. Dengan adanya faktor dukungan dari politik dan institusi maka perlunya intervensi dari pihak-pihak terlibat dalam menangani permasalahan proses kolaborasi yang ada.
3. Rekomendasi terkait faktor temuan yang menjadi penghambat proses

*collaborative goernance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Bandarharjo sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi keterbatasan dana, perlu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan teknis lainnya, guna menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan keluarga.
  - b. Mengingat pembatasan konsumsi daging hewani dalam ajaran Hindu, pemerintah dan organisasi terkait perlu menyediakan pendidikan gizi alternatif yang sesuai dengan keyakinan agama, seperti meningkatkan konsumsi protein nabati yang bergizi, seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, dan sayuran.
4. Rekomendasi terkait program Gemarikan untuk meningkatkan pola makan bergizi tinggi protein
- a. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola makan bergizi tinggi protein, program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dapat diimplementasikan (Gunawan, 2022). Program ini meliputi edukasi dan penyuluhan gizi melalui seminar dan workshop yang membahas manfaat ikan, dengan melibatkan ahli gizi. Kampanye media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang manfaat ikan dan cara mengolahnya. Selain itu, program memasak bersama, seperti lomba memasak berbahan dasar ikan di tingkat komunitas, dapat meningkatkan kreativitas dalam mengolah ikan.
  - b. Penting untuk menyediakan

akses ikan segar dengan bekerja sama dengan nelayan lokal agar masyarakat dapat memperoleh ikan dengan harga terjangkau. Program pemberian paket ikan segar kepada keluarga kurang mampu, terutama yang memiliki anak balita dan ibu hamil, dapat meningkatkan konsumsi ikan (Madyowati dkk., 2023). Pelatihan keterampilan memasak berbahan dasar ikan untuk ibu rumah tangga juga dapat diselenggarakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan pola makan bergizi tinggi protein, khususnya dari ikan, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih terintegrasi untuk mengatasi masalah stunting di Kelurahan Bandarharjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agbodzakey, J. (2024). Collaborative Governance Primer: An Antidote to Solving Complex Public Problems (T. 15, Numeris 1).
- Almahdali, H., Sampe, F., Sulaiman, S., Puspita, M., Hendrawardani, B., Parinduri, R. Y., ... & Mustari, M. (2024). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Amri Marzali. (2014). Memajukan Kebudayaan Nasional. *Humaniora*, 3(3), 258.
- Ansell, & Gash. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ashari, W. K., Adekantari, D. R., Juita, K., & Jaelani, A. M. (2024).

- Penanganan Stunting Oleh DPPKB Kota Mataram Dalam Pendekatan Collaborative Governance. *Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat*, 1(2), 14–20.
- BPS. (2023). Banjarharjo Dalam Angka 2022. Banjarharjo Dalam Angka 2022.
- Breugh, J., Rackwitz, M., & Hammerschmid, G. (2023). Leadership and institutional design in collaborative government digitalisation : Evidence from Belgium , Denmark , Estonia , Germany , and. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101788. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101788>
- Cordella, A., & Paletti, A. (2019). Government as a platform , orchestration , and public value creation : The Italian case. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101409. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101409>
- Costumato, L. (2021). Collaboration among public organizations: a systematic literature review on determinants of interinstitutional performance. *International Journal of Public Sector Management*, 34(3), 247–273.
- Dianti, Y. (2022). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(04), 5–24.
- Eriksson, E., Andersson, T., Hellström, A., & Gadolin, C. (2020). Collaborative public management : coordinated value propositions among public service organizations. *Public Management Review*, 22(6), 791–812. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1604793>
- Faizah, R. N., Ismail, I., & Kurniasari, N. D. (2024). Peran Kader Posyandu dalam Penurunan Angka Stunting. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 877-889.
- Fakhriyah, H., & Suwardi, S. (2021). Menanamkan Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Di Pengaruh Media Iklan Makanan Terhadap Pola Makan Anak Usia 4-6 Tahun. *Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI)*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.36722/jaudhi.v2i2.583>
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8308>
- Feblianto, D. A. E., Hariyoko Yusuf, & Basyar, M. R. (2024). Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai UpayaPemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Surabaya (StudiPerbandingan Di Kelurahan Pradah Kalikendal Dan KelurahanJambangan). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 1–16.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., Fazrilah, A. N., Galuh, U., Cijeungjing, K., & Mandiri,D. (2021). COLLABORATIVE

- GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN DESA. 8, 502–513.
- Gong, Y., & Li, X. (2023). Designing boundary resources in digital government platforms for collaborative service innovation. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101777. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101777>
- Gunawan, S. (2022). Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hakim, M. L. (2021). Agama dan Perubahan Sosial. Media Nusa Creative.
- Kapucu, N. (2010). Collaborative Public Management: Concepts and Applications. *Public Administration Review*.
- Keban, Y. T. (2008). Governance: Konsep, Teori, dan Implementasi. Rajawali Press.
- KEMENKES RI. (2016). Profil Kesehatan Indonesia 2016. KEMENKES RI.
- Kooiman, J. (2009). Modern Governance: New Government–Society Interactions. SAGE Publications.
- Maflahah. (2019). Kesehatan Gizi dan Nutrisi Masyarakat. Penerbit Buku Kesehatan.
- Madyowati, S. O., Handarini, K., Kusyairi, A., Hariyani, N., Sumaryam, S., Trisbiantoro, D., ... & Budiyanto, D. (2023). Penyuluhan Olahan Pangan Lokal Dan Produk Berbasis Ikan Sebagai Upaya Pencegah Stunting. MONSU'ANI TANO *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 296–309.
- Mardiasmo. (2019). PERPAJAKAN-Edisi Terbaru. Andi.
- Mauludiyah. (2020). Stunting: Konsekuensi dari Kekurangan Gizi Kronis pada Anak. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat Title. Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 45–58.
- Minogue, M. (2000). The Characteristics of Public Management. *Public Management Journal*.
- Muqorrobin, M. (2016). Proses Collaborative governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV). Universitas Airlangga.
- Ningrum, N. M. (2015). Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Melalui Taman Pemulihan Gizi Terhadap Peningkatan Status Gizi Pada Anak Usia 1 Sampai 5 Tahun (Studi Di Desa Turipinggir Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang). *Jurnal Kebidanan*, 5(2).
- Nurjana, T. I. (2013). Tradisi Nyadran Sebagai Wujud Pelestarian Nilai Gotong Royong Para Petani Di Dam Bagong Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek (Numeris 1). Universitas Negeri Malang.
- Nurul Hidayah, T., Sulaiman, A., Urruba Altriara, D., Nur Latipah, L., Qomariyah Fathekul Zanah, N., & Herayani, S. (2024). Penerapan Collaborative Governance Pada

- Orang Tua Tentang Stunting di Posyandu Puskesmas Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(12), 1234–1240. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i12.2321>
- Overman, E. S. (2010). Collaborative Public Management: Concepts and Applications. *Journal of Public Administration*.
- Parikesit, B. S., Heru, Vernanda, R. N., & Tantri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Program Pengentasan Tengkes (Studi Kasus di Desa Tambak Kalisogo). *Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 104–109.
- Pasolong, H. (2014). Konsep Dasar Administrasi Publik. Penerbit Kencana.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (s.a.). Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013. (s.a.). Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Sekretariat Kabinet.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2022). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1–13.
- Rizaldi, B. A. (2022). Rahmat Effendi divonis 10 tahun penjara. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3174409/rahmat-effendi-divonis-10-tahun-penjara>
- divonis-10- tahun-penjara
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik). Mandar Maju.
- Sepriandi, S., & Hussein, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2175>
- Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2020). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 147-158.
- Sulaiman, A. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. CV. Arfino Raya.
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13– 26. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Syafiie. (2010). Pengantar Ilmu

- Administrasi Publik. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sustainable Development. United Nations.
- The Lancet. (2013). MERS-CoV: a global challenge. *Lancet*, 381(9882).  
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61184-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61184-8).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi (11-asis leid.)*. Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. (s.a.). *Tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara.
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for*
- Sehatpour, M. (2020). Talent management in government organizations : identification of challenges and ranking the solutions to address them. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2020-0231>
- Setiadiputra, R. P. Y. (2017). Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM Secara Berkesinambungan di Lingkungan Pemerintah. *Jurnal SAWALA*, 5(1), 16–22.
- Sophianingrum, M., Setiadi, R., Nugroho, P., & Gusanti, D. K. (2021). Indikator Kinerja Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 14(2),
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50.  
<https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>.
- World Health Organization. (2021). *Global nutrition report 2021: Accelerating the momentum to end all forms of malnutrition*. <https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-nutrition-report/>.